

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu

Deden Sopandi, Fahmi Oemar*, Bambang Supeno

Universitas Lancang Kuning

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai dengan Januari 2022. Sumber data penelitian ini adalah responden pegawai dan fasilitator BUMDesa yang ada di Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Dengan 48 Sampel sebagai responden penelitian. Teknik analisis data berupa analisis uji validitas, uji reabilitas dan uji asumsi klasik yaitu uji SPSS IBM 25 dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini yaitu sub struktur 1 menunjukkan secara langsung pengendalian internal (X) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y1) dan pemanfaatan sistem informasi (X) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y2), serta pengendalian internal (Y1) memberikan pengaruh positif signifikan terhadap penerapan standar Akuntansi pemerintahan (Y2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya Sub struktur 2 yaitu pengaruh tidak langsung penerapan standar Akuntansi pemerintahan (X) terhadap kualitas laporan keuangan (Y2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu melalui pemanfaatan informasi (Y1) menghasilkan pengaruh positif signifikan.

ARTIKEL HISTORI

Accepted 25 Maret 2022

KATA KUNCI

Pengendalian Internal,
Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan,
Pemanfaatan Sistem Informasi

1. Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah tersebut selama tahun anggaran yang bersangkutan. Selain pemerintah pusat yang membuat laporan keuangan, pemerintah daerah, kota, atau provinsi beserta seluruh badan dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan.

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Selain adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sebagai pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, proses penyusunan laporan keuangan juga harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu serta data-data yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut harus akurat.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai (Fuad, 2016: 5)

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemerintah mendorong pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas publik dalam pelaporan keuangan (Din, et al. 2017). Pemerintah diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang lengkap, transparan serta memiliki

* **CORRESPONDING AUTHOR.** Email: fahmi_pala@yahoo.com

kualitas yang baik (Siallagan, et al 2017). Sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa kriteria laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik yaitu: (a) Relevan; (b) Andal; (c) Dapat dibandingkan; dan (d) Dapat dipahami.

Namun menurut Yuliani, dkk (2010) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan dari pemahaman akuntansi dari penyusunan laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah atau lemahnya peran internal audit. Dalam perkembangan kedepannya pemerintah daerah memerlukan perbaikan dalam hal meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan sangat diperlukan demi terbentuknya pemerintahan yang baik. Kualitas pemerintah daerah mempengaruhi laporan keuangan yang dibuat sehingga laporan keuangan yang dihasilkan nantinya akan dapat digunakan dengan baik dalam pengambilan keputusan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemerintah dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas antara lain pengendalian inter (Peran Internal Audit), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem informasi, Kualitas Laporan Keuangan.

Zubaidi et al (2019) menyatakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi dapat menjadi suatu faktor yang penting dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian Puspitawati dan Haq secara empiris hasil penelitiannya membuktikan bahwa pemanfaat teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang juga di dukung penelitian Siallagan (2020). Teknologi yang dimanfaatkan akan menghasilkan informasi yang berkualitas (Utama, 2017). Hal ini didukung Darmawan dan Darwanis (2018) yang menemukan bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi.

Selain pemanfaatan teknologi informasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan harus mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni kadek Sinarwati (2014), menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Terkait pengawasan internal (Peran Internal Audit) juga memiliki peran penting, untuk memastikan bahwa peraturan dapat dilaksanakan secara baik dan benar dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian Pratiwi, dkk (2015); Rosmalitas dan Nadirsyah (2020); Darwin, dkk (2020) dan Yanti (2020) membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang juga didukung dari hasil penelitian Pura (2021) dan Tingginehe, dkk (2021). Namun penelitian Mawuntu, dkk (2020) hasil penelitiannya menunjukkan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari latar belakang teori, fenomena dan research gap, penulis tertarik meneliti dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.

2. Tinjauan Pustaka

Pengendalian Internal

Pengendalian internal didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Menurut *Commite of American Institute of Accountant*

(AICPA) yang dikutip Bastian (2009: 47) menjelaskan pengendalian intern sebagai rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut oleh perusahaan untuk melindungi harta, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Yanti dkk (2020) pengawasan internal berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Purboraras (2019) menegaskan bahwa pengawasan internal merupakan keseluruhan dari proses audit, review, evaluasi, pemantauan serta pengawasan lain akan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Menurut Ulum (2008) tujuan pengawasan keuangan pemerintah adalah (1) untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan, (2) untuk menjaga agar kegiatan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran negara/daerah sesuai dengan anggaran yang telah digariskan dan (3) untuk menjaga agar pelaksanaan APBN/APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

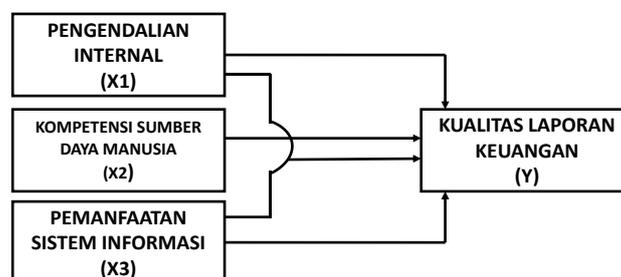
Pemanfaatan Sistem Informasi

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan sistem informasi yang mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Menurut Oktaviani (2012), sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi pemerintah yang menetapkan suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Kualitas Laporan Keuangan

Mursyidi (2013) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang disusun melalui proses yang sistematis yang terdiri dari seperangkat laporan yang saling terkait satu dengan yang lainnya seperti laporan posisi keuangan dan laporan kinerja suatu entitas pada periode tertentu dengan tujuan menyajikan berbagai informasi yang terkait dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas untuk digunakan dalam membuat dan mengevaluasi berbagai keputusan yang terkait dengan alokasi sumber daya. Puspitasari dan Anik (2020) menegaskan bahwa laporan keuangan untuk membantu top management di dalam proses pengambilan suatu keputusan.

3. Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2020) bahwa secara empiris terbukti Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang juga diperkuat dengan hasil penelitian Rosmalitas dan Nadirsyah (2020), Darwin, dkk (2020), Tingginehe (2021) dan Pura (2021). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 1. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan harus mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitian Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014), menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah:

Hipotesis 2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah didasari peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang yang digunakan pada kepentingan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan mempublikasikan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat saat ini dapat dimanfaatkan secara luas untuk kepentingan berbagai pihak dalam mengakses informasi keuangan daerah dengan cepat dan akurat. Hasil penelitian Wiranti dan Wahidawati (2021) membuktikan secara empiris pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian Sukarman dan Solovida (2021), Safitri dan Zulkarnain (2021) dan Leiterra, dkk (2021). Selanjutnya dalam penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis 3. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis 4. Secara simultan pengendalian internal, penerapan standar Akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

4. Metode

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kuantitatif, yang mana dalam Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Erlina & Mulyani, 2007: 12). Penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif, mengupas seluruh variabel yang diamati serta menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis metode verifikatif dilaksanakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji dengan statistika (Solimun dkk., 2017). Analisis verifikatif untuk menguji kebenaran suatu hipotesis dengan mengumpulkan data dari lapangan tentang seluruh variabel yang diteliti. Uji regresi linier ganda digunakan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

Penelitian ini direncanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Teknik pengolahan data menggunakan regresi linier ganda, dengan tahap awal melakukan uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji linieritas. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan SPSS IBM 25. Dengan demikian dalam penelitian ini untuk menentukan pengaruh secara parsial dan pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa yang membidangi Keuangan seperti Subag Keuangan, Bidang Keuangan, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Fasilitator BUMDesa Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 51 orang, sehingga sampel ditetapkan sebanyak 48 orang. Maka ditetapkan antara lain Subag Keuangan 6 orang, Bidang Keuangan 6 orang, Bidang Pemberdayaan Usaha ekonomi Masyarakat 7 orang dan Fasilitator BUMDesa 29 orang. Adapun Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, rencana penelitian ini memanfaatkan data primer. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan data dengan mengirimkan kuesioner kepada pegawai yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dengan Populasi (51) dan Sampel (48) menggunakan *self-administered questionnaire* (Bourque & Fielder, 2003). Selanjutnya, pendistribusian kuesioner akan dilakukan dengan metode *convenience sampling method* (Fink, 2003).

Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh atau sensus (Sugiyono, 2014:61) yang merupakan teknik penentuan sampel semua anggota populasi dijadikan sampel, karena populasi relatif kecil, yaitu populasi kurang dari 100 (Sugiyono, 2017:120). Kelebihan pada sampel jenuh yaitu dapat menghilangkan kesalahan dan tingkat ketepatan yang tinggi (Sugiyono, 2017:124).

5. Hasil dan Pembahasan

Dalam deskriptif variabel penelitian ini akan di jelaskan masing-masing variabel yaitu pengendalian internal, penerapan standar Akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Pengendalian Internal

Item Pertanyaan	M	SD	M1	D1
X1.1	4,19	0,491		
X1.2	4,15	0,505		
X1.3	4,15	0,461	4,1792	1,692
X1.4	4,21	0,459		
X1.5	4,21	0,544		

Catatan. Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) responden memberikan tanggapan 4,1792 yang dapat dikategorikan baik. Artinya pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu telah menunjukkan pengendalian internal dengan kategori baik, dengan nilai standar deviasi 1,692. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik, karena standar deviasi mencerminkan pengendalian internal yang di ikuti pegawai merata. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu sudah baik. Dimana hasil penilaian pengendalian internal pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu telah berjalan dengan baik. Suatu keharusan bagi pegawai memiliki pengendalian internal yang baik dalam pekerjaannya.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Item Pertanyaan	M	SD	M1	D1
X2.1	4,48	0,714	4,2437	2,673
X2.2	4,54	0,582		

X2.3	4,35	0,565
X2.4	4,29	0,504
X2.5	4,27	0,449
X2.6	4,13	0,334
X2.7	4,06	0,32
X2.8	4,1	0,371
X2.9	4,08	0,404
X2.10	4,12	0,393

Catatan. Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) responden memberikan tanggapan 4,2347 yang dapat dikategorikan baik. Artinya penerapan standar Akuntansi pemerintahan kerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu tentang penerapan standar Akuntansi pemerintahan atas pekerjaannya sudah baik, dengan nilai standar deviasi 2,673. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik, karena standar deviasi mencerminkan penyebaran data yang menunjukkan penerapan standar Akuntansi pemerintahan kerja pegawai merata. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan standar Akuntansi pemerintahan berhasil memberdayakan semua sumber daya pegawai dan seluruh elemen (*stakeholder*) Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana pendapat Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni kadek Sinarwati (2014), menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi

Item Pertanyaan	M	SD	M1	D1
X3.1	4,06	0,522		
X3.2	4,06	0,522		
X3.3	4,08	0,577		
X3.4	4,02	0,483		
X3.5	4,15	0,545		
X3.6	4,06	0,561	4,1000	3,632
X3.7	4,1	0,425		
X3.8	4,1	0,515		
X3.9	4,19	0,445		
X3.10	4,17	0,429		

Catatan. Data Olahan 2022

Produktivitas pemanfaatan sistem informasi yang diukur secara kuantitatif berdasarkan tabel 3 diketahui nilai rata-rata (*mean*) variabel produktivitas kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu sebesar 4,1000 dengan standar deviasi sebesar 3,632. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik, karena standar deviasi mencerminkan penyebaran data yang menunjukkan produktivitas kerja pegawai merata. Dengan demikian produktivitas kerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu di kategorikan baik. Ini menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu memiliki produktivitas kerja yang baik.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Item Pertanyaan	M	SD	M1	D1
Y.1	4,17	0,476		
Y.2	4	0,461		
Y.3	4,08	0,454		
Y.4	4,19	0,445		
Y.5	4,13	0,334		
Y.6	4,13	0,334	4,1173	2,474
Y.7	4,06	0,32		
Y.8	4,04	0,289		
Y.9	4,13	0,393		
Y.10	3,92	0,279		
Y.11	3,88	0,334		
Y.12	4,71	0,544		

Catatan. Data Olahan 2022

Produktivitas Kualitas Laporan Keuangan yang diukur secara kuantitatif berdasarkan tabel 4 diketahui nilai rata-rata (*mean*) variabel produktivitas kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu sebesar 4,1173 dengan standar deviasi sebesar 2,474. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik, karena standar deviasi mencerminkan penyebaran data yang menunjukkan produktivitas kerja pegawai merata. Dengan demikian produktivitas kerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu di kategorikan baik. Ini menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu memiliki produktivitas kerja yang baik.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	Corrected Item-Total Correlated	Item Pertanyaan	Corrected Item-Total Correlated
X1.1	0,446	X3.4	0,669
X1.2	0,478	X3.5	0,688
X1.3	0,678	X3.6	0,632
X1.4	0,679	X3.7	0,572
X1.5	0,572	X3.8	0,567
X2.1	0,301	X3.9	0,673
X2.2	0,36	X3.10	0,691
X2.3	0,317	Y.1	0,355
X2.4	0,469	Y.2	0,066
X2.5	0,485	Y.3	0,478
X2.6	0,381	Y.4	0,4
X2.7	0,446	Y.5	0,599
X2.8	0,596	Y.6	0,361
X2.9	0,603	Y.7	0,338
X2.10	0,511	Y.8	0,319
X3.1	0,664	Y.9	0,486
X3.2	0,664	Y.10	0,389
X3.3	0,629	Y.11	0,361

Y.12

0,33

Catatan. Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai *Corrected Item-Total Correlated* indikator dari seluruh variabel dengan nilai terendah 0,301 dan tertinggi 0,691 lebih besar dari 0,3, sehingga dapat dinyatakan valid.

Tabel 6. Nilai VIF, DW

Variabel	VIF	DW
Pengendalian Internal	2,407	
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	2,339	1,997
Pemanfaatan Sistem informasi	3,994	

Catatan. Data Olahan 2022

Dari nilai toleran dan nilai VIF ketiga variabel independen nilai toleran $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , dengan demikian dapat disimpulkan ketiga variabel independen, dinyatakan bebas dari terjadinya multikolinieritas. Dari tabel Durbin-Watson diketahui DW_{upper} sebesar 1,6708 dan DW_{lower} sebesar 1,4064 serta DW_{hitung} sebesar 1,997. Dengan demikian $1,6708 < 1,997 < 4 - 1,6708 = 2,3292 < 1,997 < 1,6708$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi antar variabel independen.

Tabel 7. Uji Linieritas Pengendalian internal terhadap Kualitas laporan keuangan

Penjelasan	Nilai Sig. Deviation from Linierity	Alpha	Keterangan	Kesimpulan
Pengendalian internal → Kualitas Laporan Keuangan	0,12	0,05	Nilai Sig. > Alpha	Linier
Penerapan standar Akuntansi pemerintahan → Kualitas Laporan Keuangan	0,441	0,05	Nilai Sig. > Alpha	Linier
Pemanfaatan sistem informasi → Kualitas Laporan Keuangan	0,441	0,05	Nilai Sig. > Alpha	Linier

Catatan. Data Olahan 2022

Berdasarkan dari data pada tabel 7 bahwa hasil uji linieritas menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel pengendalian internal, diketahui nilai Sig sebesar $0,371 > 0,05$, dan variabel penerapan standar Akuntansi pemerintahan diketahui nilai Sig sebesar $0,288 > 0,05$, dan variabel pengukuran pemanfaatan informasi diketahui nilai Sig sebesar $0,136 > 0,05$. Maka dapat ditarik simpulan bahwa ketiga variabel independen (pengendalian internal, penerapan standar Akuntansi pemerintahan dan pengukuran pemanfaatan sistem informasi) memiliki model regresi berbentuk Linier terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan.

Tabel 8. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tol	VIF	
1	(Constant)	14.958	2.604		5.745	.000		
	X1	.485	.137	.332	3.531	.000	.415	2.407
	X2	.381	.086	.412	4.448	.000	.427	2.339
	X3	.199	.082	.292	2.409	.020	.250	3.994

Catatan. Data Olahan 2022

Dari hasil uji regresi yang tampak pada tabel 8 diketahui nilai konstanta sebesar 14,958 dan nilai signifikan hasil uji regresi variabel pengendalian sistem informasi (X1) terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,485 atau sebesar 48,5% dengan signifikansi 0,001

atau lebih kecil dari alpha 0,05. Koefisien regresi variabel penerapan standar Akuntansi pemerintahan (X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,381 atau sebesar 38,1% dengan signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari alpha 0,05 dan koefisien regresi variabel pengukuran pemanfaatan sistem informasi (X3) terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,199 atau sebesar 19,9%, dengan signifikansi sebesar 0,020 atau lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga dapat ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 14,958 + 0,048 X_1 + 0,381 X_2 + 0,199 X_3$$

Hasil uji hipotesis terlihat bahwa variabel pengendalian internal (X1) diperoleh thitung sebesar 3,531 lebih besar dari ttabel sebesar 1,677, dengan n (sampel) 48 responden dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari alpha 0,05. Ini artinya variabel pengendalian internal dapat menerangkan variabel kualitas laporan keuangan dan adanya pengaruh positif yang signifikan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0,485 atau 48,5%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, terbukti dan dapat diterima.

Selanjutnya variabel penerapan standar Akuntansi pemerintahan (X2) diperoleh thitung sebesar 4,448 lebih besar dari ttabel sebesar 1,677, dengan n (sampel) 48 responden dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05. Ini artinya variabel penerapan standar Akuntansi pemerintahan dapat menerangkan variabel kualitas laporan keuangan dan adanya pengaruh positif yang signifikan penerapan standar Akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0,381 atau 38,1%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan penerapan standar Akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa Kabupaten Rokan Hulu, terbukti dan dapat diterima.

Kemudian variabel pemanfaatan sistem informasi (X3) diperoleh thitung sebesar 2,409 lebih besar dari ttabel sebesar 1,677, dengan n (sampel) 48 responden dan nilai signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari alpha 0,05. Ini artinya variabel pemanfaatan sistem informasi dapat menerangkan variabel kinerja keuangan dan adanya pengaruh positif yang signifikan pemanfaatan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0,199 atau 19,1%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pemanfaatan informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, terbukti dan dapat diterima.

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel pengendalian internal, penerapan standar Akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan nilai Fhitung sebesar 76,246 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,80 dan besarnya nilai signifikan 0,000. Karena signifikansi (sig) lebih kecil dari 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa variabel pengendalian internal, penerapan standar Akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengendalian internal, penerapan standar Akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi maka akan mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengendalian internal, penerapan standar Akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi secara bersama berpengaruh terhadap kualitas keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten rokan Hulu, dapat diterima.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pengendalian internal, penerapan standar Akuntansi pemerintahan, pemanfaatan informasi dapat mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai Adjusted R Square seperti tampak pada tabel 4.11, bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) yang diperoleh sebesar 0,839 atau 83,9% Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dapat dipengaruhi oleh pengendalian internal, penerapan standar Akuntansi pemerintahan, pemanfaatan informasi sebesar 83,9%, sedangkan sisanya sebesar 16,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Analisis Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan antara pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Temuan ini membuktikan prediksi hipotesis yaitu pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Pengendalian internal meliputi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan Standard Operating Procedure (SOP), mengimplementasikan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat mencegah kecurangan dan penyelewengan, membuat dan menggunakan dokumen/catatan yang memadai. Telah dilakukan pemisahan wewenang secara tepat, pegawai bekerja untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi, diterapkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

Indikator pengendalian internal sudah sesuai dengan pendapat Mahmudi (2010) merupakan proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajaran untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan menerapkan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders. (Sukmaningrum, 2012).

Hasil penelitian ini mendukung temuan Darmawan, dkk (2017) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi efektivitas sistem pengendalian internal pada KPN di Kabupaten Karangasem, maka kualitas laporannya akan semakin tinggi juga. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Atika, dkk (2019) bahwa setelah pengujian yang telah dilakukan, secara parsial peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Medan.

Analisis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan penerapan standar Akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Temuan ini membuktikan prediksi hipotesis yaitu penerapan standar Akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. penerapan standar Akuntansi pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu ditunjukkan oleh penerapan standar Akuntansi pemerintahan dalam bekerja pada organisasi, secara sungguh-sungguh berkomitmen dalam melaksanakan tugas sesuai SOP, dan berkomitmen tetap bekerja pada

organisasi. penerapan standar Akuntansi pemerintahan yang ditunjukkan oleh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni kadek Sinarwati (2014), menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik.

Sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan. Perubahan itu sudah sampai pada tehnik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam sistem akuntansi dan prosedur pencatatannya, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006).

Analisis Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan pemanfaatan sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Temuan ini membuktikan prediksi hipotesis yaitu pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Pemanfaatan sistem informasi yang dimaksud dalam penelitian ini dengan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu, informasi laporan keuangan, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang, laporan keuangan disajikan dan diterbitkan tepat waktu sesuai periode akuntansi, laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan. Laporan keuangan menghasilkan informasi yang jujur sesuai transaksi yang terjadi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna, dapat dipahami dengan jelas, serta disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.

Hal ini sesuai dengan pendapat Oktaviani (2012), sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi pemerintah yang menetapkan suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung temuan dari Pratiwi, dkk (2015) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Rosmalita & Nadirsyah (2020) bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh. Namun, hasil penelitian ini tidak dengan temuan Yanti, dkk (2020) erdasarkan. hasil. analisis bab sebelumnya telah diketahui bahwa Pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi OPD Kota Malang).

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, adapun beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut: Terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian terdapat pengaruh penerapan standar Akuntansi pemerintahan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya terdapat pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Dan terdapat pengaruh pengendalian internal melalui motrifasi kerja terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.

7. Referensi

- Agoes, S. (2017). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik 1.
- Alleyne, P., Charles-Soverall, W., Broome, T., & Pierce, A. (2017). Perceptions, predictors and consequences of whistleblowing among accounting employees in Barbados. *Meditari Accountancy Research*.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2006). Auditing dan pelayanan verifikasi edisi kesembilan Pendekatan Terpadu Vol. 2 (Ford Lumban Gaol). *Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia*.
- Azhar, S. (2013). Sistem Informasi Akuntansi. *Bandung: Lingga Jaya*, 5(1).
- Bahri, S. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis, Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS.
- Bourque, L., & Fielder, E. P. (2003). *How to conduct self-administered and mail surveys* (Vol. 3). Sage.
- Fikri, M. A., Inapty, B. A., & Martiningsih, S. P. (2015). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating (Studi empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). *Symposium Nasional Akuntansi*, 18, 5-76.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, cet.
- Gujarati, Damodar N dan Porter, Dawn C. "Dasar-Dasar Ekonometrika". Salemba Empat, Jakarta. 2011.
- Gujarati., 2012, Dasar-dasar Ekonometrika. Terjemahan Mangunsong, R.C. Jakarta : Salemba Empat.
- Gujarati., 2012, Dasar-Dasar Ekonomitrika. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali., Imam. 2011, Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali., Imam. 2011, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS (edisi kelima). Universitas Diponegoro. Semarang [Skripsi].
- Hamonangan Siallagan, Akuntabilitas, Jurusan Akuntansi, Universitas HKBP Nommensen, Sumatera Utara, Indonesia, 211-224.
- Hevesi, G. Alan. 2005. Standards for Internal Control in New York State Government. Diunduh dari: www.osc.state.ny.us
- Indonesia, E. Aldiani, Sulani. 2010. "Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu". *Jurnal Akuntansi* 12, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.(Online). *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2260-2287.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir). *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI*. 23-24 Juli. Pontianak.

- Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati dan Ni kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 No. 1, Hal 171-176
- Laporan, A. T. K., Pariaman, K., Dan, L. K. D. T. T., Ambon, K. D. K., Manusia, P. T. I., & Ilir, K. O. (2006). Afiyah, Nunuy Nur. 2010. Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Kencana: Jakarta.
- Arfiyanti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang). Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol, 2(1).
- Mahmudi., 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN.
- Mardiasmo.,2002, Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset,Yogyakarta.
- Melda, Mariana, Poeh, 2020, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang, Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan, Pengalaman Kerja Dan Penguasaan Sikd Pada Skpd Di Kota Kupang, 8-17.
- Mulyadi. 2002. Auditing, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Mursyidi. 2013. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.
- Mawuntu, MM, Pangemanan, D, dan Mintjelungan, C 2015, Gambaran Status Kebersihan Mulut Siswa SD Katolik ST. Agustinus Kawangkoan, *Jurnal eGiGi (eG)*, Vol 3, No 2, Juli Desember 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id> Diakses pada tanggal 12 April 2020.
- Nanda, S. T., Zenita, R., Anita, R., & Abdillah, M. R. (2019). The role of investment opportunity set on financially distressed firm's value. *International Journal of Engineering & Technology*, 8(1.8), 154-158.
- Neuman, W. L. (2011). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative. Approaches (7th Edition ed.)*. Boston, United States of America: Pearson. Education.
- Nova Rosmalita., Nadirsyah, 2020, Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.
- Oktaviani,Vidya., 2012, "Akuntansi keuangan daerah", <http://vidyaoktaviani.blogspot.com> diakses pada tanggal 26 Agustus 2021
- Patra, A. D. A., Bustami, L., & Hasriani, H. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 2(1).
- Puspitasari, E., & Anik, S. 2020, Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kekuatan Koersif, Tingkat Pendidikan, Dan Pelatihan Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4, 1369-1388.
- Pura, Rahman., 2020, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Stiem Bongaya Makassar, Hal. 1 - 13
- Rahmadhani, Masita, 2021, Pengaruh Kompetensi Dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Etika Sebagai Variabel *Moderating* Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnal Juhanperak*, Vol. 2, No. 1, hal. 301-312
- Ralph., M.S. and George W.R., 2010, Principles of Information Systems. Course Technology, 9th ed.
- Ridwan, Mochammad. (2012). Pengaruh komitmen organisasi memoderasi dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. *eJournal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*(Vol.2 No.1)
- Sarjono, Haryadi., dan Julianita, Winda. 2011, SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset. Penerbit Salemba empat, Jakarta.
- Setyo., 2013, " Tanggung jawab audit internal atas fungsi-fungsi lainnya." <http://auditorinternal.com> diakses tanggal 25 Agustus 2021.
- Singarimbun., M & Effendi, S., 2011, Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3S.
- Sugiyono., 2014, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono., 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono., 2017, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono., 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Triwardana, Dhedy. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*. Vol. 4, No. 1.
- Tingginehe., Stasya Meily, 2021, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Kasus Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud), hal, 1352-1359.
- Warisno., 2008, *Teknologi Pengolahan dan Pengawetan Pangan Secara Sederhana*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Widodo, Eko., & Suparno.2015.” *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*”.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yanto,Eko Budiri., 2013, ” *Kajian legal sistem informasi keuangan*
- Yanti, Nanda Saputri., 2020, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Opd Kota Malang), *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (Jrma) Volume 8, No. 1*, hal.1-8.
- Yuliani Nuraini Sujiono, Bambang Sujiono. 2010. *Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak*. Jakarta: Indeks.
- Yuslaini, Y., & Supeno, B., 2020, Exploring Performance and Traceability Environment on Dept. of Housing Settlement and Lands. *E&ES*, 469(1), 012075.
- Zubaidi, A. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ERC pada perusahaan real estate. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(1).